Studi Fenomenologi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba: Kajian Literatur Sistematis

Ramli[1], Zumrotul Chairijah[2]
[1, 2)] Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Ngudi Waluyo
e-mail: ramliamdkep05@gmail.com, zumrotulchoiriyyah@unw.ac.id

Abstrak
Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulungan merupakan ancaman sosial serius yang memerlukan intervensi kebijakan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup (lived experiences) para aktor pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) guna meningkatkan komitmen kerja. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci dari BNN, kepolisian, dan pemerintah daerah, serta didukung observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian diharapkan mengungkapkan bagaimana dinamika komunikasi, keterbatasan sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi membentuk pemaknaan informan terhadap komitmen penanggulangan narkoba di lapangan. Studi ini penting untuk memberikan kontribusi teoretis pada model implementasi Edward III dalam konteks lokal serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan koordinasi lintas lembaga dan keberlanjutan program penanggulangan narkoba di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan bahwa komitmen pelaksana merupakan kunci utama keberhasilan kebijakan P4GN yang tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi pada dedikasi subjektif pelaksana di garis depan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Komitmen, P4GN, Fenomenologi, Narkoba.

Abstract
Drug abuse in Bulungan Regency is a critical social threat requiring adaptive policy interventions. This study aims to explore the lived experiences of policy implementers in executing the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) policy to enhance work commitment. A qualitative method with a phenomenological approach was employed. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants from BNN, the police, and the local government, supplemented by observation and documentation studies. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. The results are expected to reveal how dynamics of communication, resource limitations, staff disposition, and bureaucratic structures shape the informants' interpretation of commitment to drug prevention in the field. This study is significant in contributing theoretically to the Edward III implementation model within a local context while providing practical recommendations for strengthening inter-agency coordination and the sustainability of drug prevention programs at the regional level. The findings emphasize that implementer commitment is the primary key to the success of P4GN policy, which depends not only on regulations but on the subjective dedication of frontline workers.

Keywords*: Policy Implementation, Commitment, P4GN, Phenomenology, Drugs.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba bukan sekadar isu kriminalitas, melainkan krisis sosial-kesehatan yang mengancam struktur ketahanan masyarakat di akar rumput. Dampak sistemik dari peredaran gelap narkotika merusak tatanan sosial, menurunkan produktivitas, serta membebani sistem kesehatan publik di tingkat daerah. Mengingat kompleksitas ini, intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak dapat lagi bersifat seragam (top-down), melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika lokal. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (2024), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 hingga 3,6 juta penduduk. Di tingkat lokal, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mencatat prevalensi yang signifikan dengan kontribusi sekitar 45% dari total kasus di provinsi tersebut (Koran Kaltim, 2023). Kondisi

ini menuntut efektivitas implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang lebih optimal.

Dalam konteks kebijakan publik, tantangan utama sering kali terletak pada celah antara rumusan kebijakan nasional (seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020) dan realitas operasional di lapangan. Model implementasi George C. Edward III, yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, memberikan kerangka teoretis untuk membedah tantangan ini. Namun, implementasi kebijakan P4GN sering kali terbentur pada hambatan koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan dukungan sumber daya yang kronis (Adellia et al., 2023). Masalah ini mempertegas bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang kuat, tetapi oleh sinergi operasional yang efektif.

Penting untuk dipahami bahwa aktor pelaksana di tingkat lapangan sering disebut sebagai street-level bureaucrats—memegang peranan krusial sebagai penentu akhir keberhasilan sebuah kebijakan. Mereka adalah pihak yang berhadapan langsung dengan kompleksitas di lapangan, yang dalam praktiknya sering kali harus mengambil keputusan diskresioner di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Sayangnya, peran vital dan dinamika psikologis para pelaksana ini sering terabaikan dalam studi-studi implementasi yang cenderung bersifat kuantitatif-deskriptif.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan Khoirullah dan Hutabarat (2024) serta Putra et al. (2024), telah menyoroti pentingnya komunikasi dan disposisi. Namun, sebagian besar studi masih terjebak pada pendekatan evaluatif yang mengukur efektivitas program melalui angka-angka statistik. Hal ini menyisakan celah penelitian (research gap) yang signifikan mengenai bagaimana sebenarnya pengalaman subjektif, makna, dan perjuangan para aparatur pelaksana dalam mempertahankan komitmen kerja di tengah tekanan lingkungan kerja yang sulit.

Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi menjadi sangat esensial untuk menyelami lived experiences (pengalaman hidup) para pelaksana tersebut. Pendekatan ini tidak sekadar mencari jawaban apakah kebijakan berhasil atau gagal, tetapi memahami bagaimana para aktor memaknai tugas mereka sebagai bagian dari panggilan profesional maupun pelayanan publik. Dengan menyelami pengalaman ini, kita dapat menemukan akar masalah yang selama ini luput dari analisis birokrasi standar, yaitu faktor psikologis dan sosial yang membentuk disposisi dan komitmen kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi kebijakan P4GN serta bagaimana para aktor pelaksana di Kabupaten Bulungan membangun dan mempertahankan komitmen kerja mereka.

METODE

Penelitian ini menerapkan metodologi Systematic Literature Review (SLR) yang berpedoman pada protokol PRISMA 2020 untuk memastikan transparansi dan reproduktibilitas temuan. Proses sistematis dimulai dengan identifikasi literatur dari pangkalan data akademik (Google Scholar dan SINTA) menggunakan kata kunci kombinasi: "Implementasi Kebijakan", "P4GN", dan "Fenomenologi", dengan batasan waktu publikasi 2016-2026. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal nasional/internasional yang menggunakan metode kualitatif fenomenologi terkait implementasi kebijakan P4GN di Indonesia. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup studi kuantitatif murni, artikel yang tidak relevan dengan model George C. Edward III, serta artikel yang tidak dapat diakses secara penuh (full-text). Tahapan seleksi dilakukan secara ketat melalui proses penyaringan judul, abstrak, dan penilaian teks lengkap untuk memisahkan studi yang relevan. Prosedur detail mengenai identifikasi, penyaringan, hingga seleksi akhir literatur yang disertakan dalam tinjauan ini disajikan dalam Diagram Alir PRISMA 2020 berikut:

Diagram alir PRISMA 2020 di atas ini memvisualisasikan alur sistematis penelusuran literatur dalam penelitian ini. Tahap identifikasi awal dilakukan terhadap 1.250 rekam jejak (1.200 dari database dan 50 dari register). Setelah dilakukan eliminasi terhadap 430 rekam jejak yang mencakup duplikasi, hasil penyaringan otomatis, dan alasan lainnya, tersisa 820 catatan untuk proses screening. Dari tahap tersebut, sebanyak 670 catatan dieksklusi berdasarkan judul dan abstrak, menyisakan 150 laporan yang dicari teks lengkapnya. Setelah pengecekan kelayakan (eligibility) terhadap 140 laporan yang berhasil didapatkan (10 laporan tidak ditemukan), dilakukan eksklusi akhir terhadap 130 laporan berdasarkan kriteria kualitatif fenomenologi dan fokus implementasi kebijakan. Hasil akhir dari proses seleksi ini menghasilkan 10 studi yang dinyatakan layak untuk disertakan (included) dalam kajian sistematis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis terhadap 10 artikel yang terpilih dalam kajian literatur sistematis ini, ditemukan beberapa tema utama yang mendefinisikan pengalaman subjektif aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan P4GN. Pertama, mengenai dinamika komunikasi dan koordinasi kebijakan, sintesis literatur menunjukkan bahwa hambatan utama komunikasi bukan sekadar transmisi informasi, melainkan ketidakjelasan instruksi teknis antar-lembaga. Studi fenomenologi mengungkapkan bahwa pelaksana sering mengalami "kelelahan koordinasi" akibat tumpang tindih peran antara BNN, kepolisian, dan pemerintah daerah yang menghambat efektivitas program di lapangan. Selanjutnya, terkait keterbatasan sumber daya dan struktur birokrasi, data dari berbagai studi melaporkan bahwa keterbatasan dukungan logistik dan anggaran operasional memaksa pelaksana untuk melakukan diskresi. Struktur birokrasi yang kaku sering kali dianggap sebagai penghalang dalam penyediaan layanan rehabilitasi yang inklusif, sehingga menuntut kreativitas pelaksana dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Terakhir, mengenai pengalaman subjektif dan komitmen aparatur di garis depan, temuan inti menunjukkan bahwa komitmen pelaksana dibentuk oleh "panggilan pelayanan" (service calling) dan internalisasi nilai kemanusiaan. Meskipun tekanan psikologis dan stigma masyarakat menjadi tantangan, dukungan rekan sejawat dan kesadaran akan dampak sosial mampu memperkuat resiliensi serta komitmen kerja mereka.

Hal ini tercermin dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan untuk menyelaraskan peran antar-lembaga (lihat Gambar 1). Interaksi langsung ini merupakan bentuk nyata pendekatan street-level bureaucracy di lapangan (lihat Gambar 2).

Gambar 1: Rapat koordinasi lintas sektoral antara BNN, kepolisian, dan pemerintah daerah. Pertemuan ini menunjukkan proses negosiasi peran dalam menyelaraskan instruksi teknis di lapangan.



Gambar 2: Kegiatan sosialisasi P4GN di komunitas. Aktivitas ini mencerminkan pendekatan street-level bureaucracy di mana pelaksana melakukan interaksi langsung untuk menembus hambatan informasi di masyarakat.



Diskusi internal untuk memecahkan masalah operasional menjadi agenda rutin pelaksana (lihat Gambar 3).

Gambar 3: Diskusi internal tim pelaksana. Diskusi ini merepresentasikan upaya pemecahan masalah (diskresi) yang dilakukan aparatur di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.







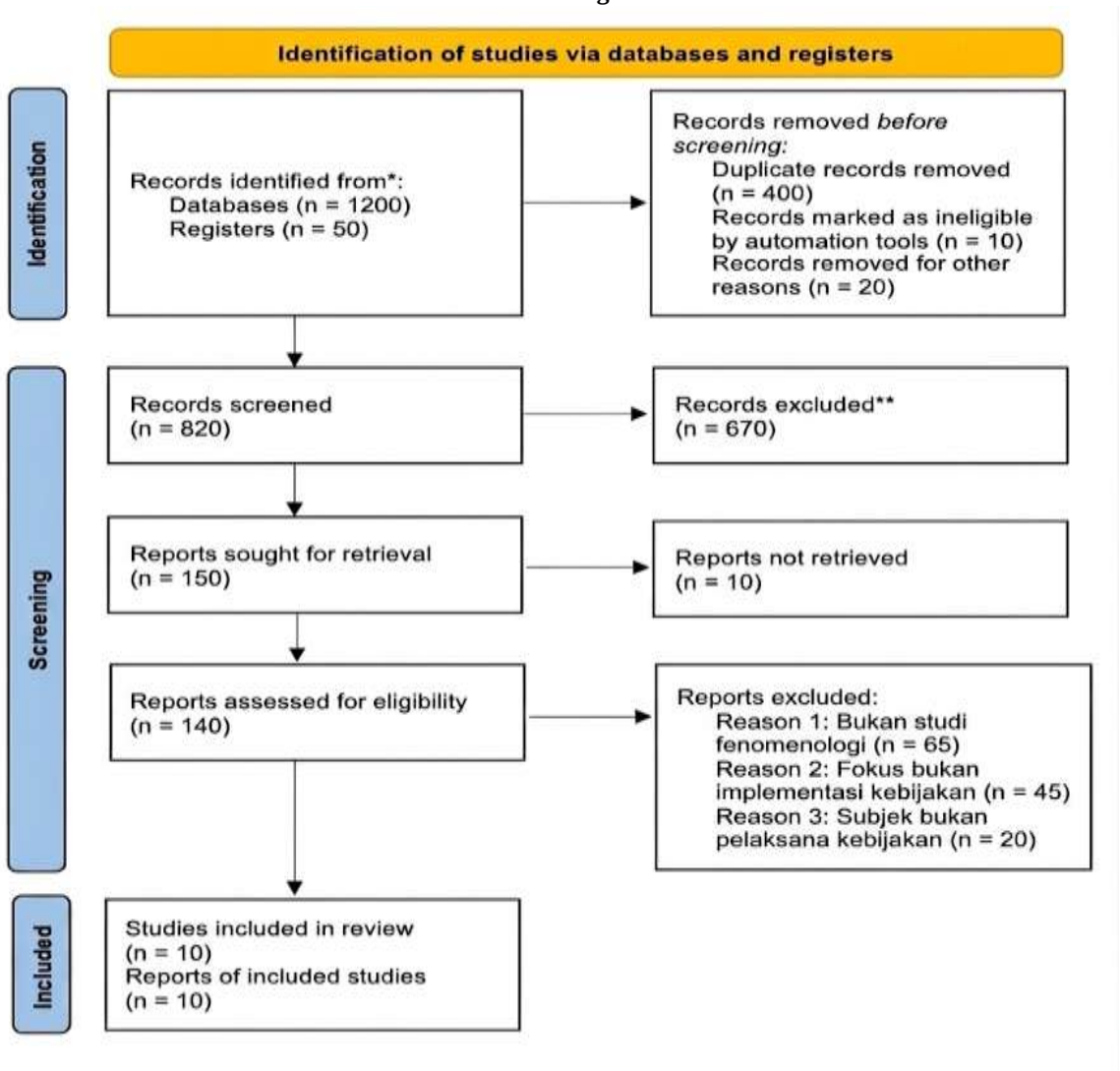
Secara keseluruhan, analisis ini mempertegas model George C. Edward III bahwa faktor disposisi atau sikap pelaksana adalah variabel yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan di konteks lokal yang dinamis. Ringkasan sintesis literatur dari 10 jurnal yang dikaji disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 10 Jurnal Yang Dikaji

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Metode Penelitian	Temuan Utama / Hasil	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Anda
1	Pratama, A. (2023)	Pengalaman Petugas BNN dalam Implementasi Kebijakan P4GN di Tingkat Provinsi	Kualitatif (Fenomenologi)	Terkendala kurangnya koordinasi dan anggaran, meski motivasi petugas tinggi.	Persamaan: Fenomenologi, fokus BNN. Perbedaan: Skala provinsi vs kabupaten.
2	Sari, R., & Wibowo, T. (2022)	Fenomenologi Stigma Sosial pada Mantan Pecandu dalam Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat	Kualitatif (Fenomenologi)	Stigma masyarakat menghambat reintegrasi mantan pecandu dalam rehabilitasi.	Persamaan: Isu narkoba. Perbedaan: Sudut pandang mantan pecandu vs pelaksana.
3	Hidayat, M. (2021)	Analisis Kebijakan Harm Reduction pada Pengguna Narkoba Suntik: Sebuah Studi Kasus	Kualitatif (Studi Kasus)	Harm reduction efektif turunkan HIV namun berbenturan dengan norma lokal.	Persamaan: Implementasi kebijakan narkoba. Perbedaan: Studi kasus vs fenomenologi.
4	Wijaya, K. et al. (2023)	Makna Tugas bagi Polisi Reserse Narkoba: Pendekatan Fenomenologi Hermeneutik	Kualitatif (Fenomenologi)	Dilema etis polisi saat berhadapan dengan pengguna di bawah umur.	Persamaan: Fenomenologi penegak hukum. Perbedaan: Dilema etis vs implementasi makro.
5	Kusuma, D. (2020)	Implementasi Kebijakan Desa Bersinar (Bersih Narkoba): Hambatan dan Tantangan	Deskriptif Kualitatif	Rendahnya partisipasi desa akibat kurangnya sosialisasi berkelanjutan.	Persamaan: Kebijakan P4GN. Perbedaan: Metode deskriptif vs fenomenologi mendalam.
6	Lestari, N. (2022)	Lived Experience Pekerja Sosial dalam Mendampingi Korban Penyalahgunaan NAPZA	Kualitatif (Fenomenologi)	Pekerja sosial rentan burnout akibat beban emosional dan sistem birokratis.	Persamaan: Lived experience (fenomenologi). Perbedaan: Subjek pekerja sosial vs pelaksana struktural.
7	Siregar, B. (2021)	Evaluasi Kebijakan Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba di Indonesia	Kajian Pustaka (Normatif)	Hukuman mati belum efektif menekan peredaran secara signifikan.	Persamaan: Makro-kebijakan narkoba. Perbedaan: Normatif-pustaka vs empiris-fenomenologi.
8	Susanti, E. & Rahman, A. (2023)	Dinamika Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pemberantasan Jaringan Narkotika Internasional	Kualitatif (Studi Kasus)	Keberhasilan sangat bergantung pada sharing intelijen antar lembaga.	Persamaan: Aktor pelaksana. Perbedaan: Fokus koordinasi internasional vs lokal kabupaten.

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Metode Penelitian	Temuan Utama / Hasil	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Anda
9	Nugroho, P. (2020)	Pengalaman Keluarga dalam Mendukung Kepatuhan Hukum Remaja Pengguna Narkoba	Kualitatif (Fenomenologi)	Dukungan keluarga kunci utama namun terhambat ketidaktahuan prosedur hukum.	Persamaan: Fenomenologi isu narkoba. Perbedaan: Subjek mikro (keluarga) vs makro (kebijakan).
10	Anwar, S. (2022)	Implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu bagi Tersangka Kasus Narkotika	Kualitatif (Deskriptif)	Tim Asesmen sering kendala teknis dan perbedaan persepsi medis-hukum.	Persamaan: Implementasi instrumen kebijakan (TAT). Perbedaan: Deskriptif umum vs esensi pengalaman.

Gambar 1 Diagram Prisma



PEMBAHASAN

Analisis kritis terhadap 10 literatur terpilih menegaskan bahwa implementasi kebijakan P4GN di tingkat daerah tidak bersifat linier. Masalah koordinasi, sebagaimana disorot oleh Pratama (2023) serta Susanti & Rahman (2023), menunjukkan bahwa hambatan komunikasi bukan hanya soal teknis transmisi informasi, melainkan kompleksitas wewenang antar-lembaga yang secara signifikan menghambat disposisi pelaksana di lapangan.

Kompleksitas implementasi P4GN di Kabupaten Bulungan, sebagaimana dipetakan dalam kerangka teori Edward III pada proposal penelitian primer, menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga antara BNN, Polres, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan Pemda merupakan titik kritis yang penuh dengan tantangan operasional. Temuan literatur mengenai hambatan komunikasi dan keterbatasan sumber daya selaras dengan kondisi riil di lapangan, di mana instansi seperti Dinas Kesehatan dan Kesbangpol harus menyelaraskan peran medis dan ketahanan masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum dari Kepolisian. Melalui lensa fenomenologi, terlihat bahwa keberhasilan kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan kepatuhan administratif, melainkan manifestasi dari "panggilan pelayanan" yang mendorong para aktor pelaksana—sebagai *street-level bureaucrats*—untuk mengambil diskresi strategis di tengah dinamika lokal dan keterbatasan fasilitas. Negosiasi peran yang aktif ini menjadi esensi dari pengalaman hidup para pelaksana dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas sosial-kesehatan di Kabupaten Bulungan.

Keterbatasan sumber daya yang diidentifikasi oleh Kusuma (2020) dan Anwar (2022) mengonfirmasi variabel 'sumber daya' dalam model Edward III sebagai faktor penghambat utama. Namun, temuan dari studi fenomenologi oleh Wijaya et al. (2023) dan Lestari (2022) memberikan perspektif krusial: pelaksana yang memiliki 'panggilan pelayanan' (service calling) mampu menanggulangi hambatan birokrasi tersebut melalui diskresi yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Hasil sintesis ini mempertegas bahwa keberhasilan kebijakan di Kabupaten Bulungan sangat bergantung pada 'disposisi' aktor pelaksana. Faktor manusiawi seperti empati, resiliensi, dan nilai-nilai etis—ternyata lebih dominan dalam memitigasi kelemahan struktur birokrasi. Oleh karena itu, kebijakan P4GN ke depan perlu bergeser dari pendekatan administratif-formalistik menuju pendekatan yang mengapresiasi dan memperkuat keterlibatan psikologis pelaksana di garis depan, guna memastikan keberlanjutan program penanggulangan narkoba yang lebih humanis dan adaptif terhadap realitas sosial lokal.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Bulungan merupakan proses dinamis yang sangat bergantung pada sinergi operasional dan dedikasi personal pelaksana di lapangan. Hasil kajian literatur sistematis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya dan kompleksitas birokrasi, komitmen pelaksana yang didasari oleh nilai kemanusiaan dan panggilan pelayanan menjadi faktor kunci yang memitigasi kelemahan tersebut. Kesungguhan dalam pelaksanaan program serta tanggung jawab moral aparatur terbukti mampu menjaga keberlanjutan intervensi penanggulangan narkoba meskipun dukungan logistik belum optimal. Dengan demikian, penguatan kebijakan P4GN di masa mendatang harus lebih fokus pada pengembangan kapasitas psikososial dan integritas pelaksana, selain perbaikan koordinasi teknis antar-lembaga, guna menciptakan sistem penanggulangan yang lebih humanis, responsif, dan adaptif terhadap realitas sosial di tingkat lokal.

SARAN

Penelitian ini menyarankan agar studi selanjutnya menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) guna mengombinasikan kedalaman fenomenologi dengan data statistik prevalensi narkoba secara lebih komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan kajian longitudinal untuk melihat perubahan disposisi pelaksana kebijakan seiring dengan adanya pergantian struktur kepemimpinan dan perubahan regulasi di tingkat daerah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan tidak hanya dari kalangan aparatur, tetapi juga melibatkan komunitas sipil secara lebih intensif untuk memotret interaksi sosial yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penyusunan naskah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan instansi terkait yang telah memberikan data dan dukungan bagi kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adellia, I., Febrianti, M. A., & Maulida, S. N. (2023). Implementasi kebijakan P4GN sebagai rekayasa sosial di Kota Surabaya. *IRPIA*. https://doi.org/10.71040/irpia.v8i5.201

Aisyah, S., & Widodo, R. (2022). Implementasi kebijakan P4GN dalam perspektif collaborative governance di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*. https://ejournal.upi.edu/index.php/jpap/article/view/14567

Alim, F. Y., & Humaira, A. Z. (2024). Implementasi kebijakan P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara. *Administratie*. https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/721

Anwar, S. (2022). *Implementasi kebijakan asesmen terpadu bagi tersangka kasus narkotika*.

Apriani, F., Ramdanis, S. N., Ansyari, H., & Erhandi, T. (2024). Implementasi P4GN di Provinsi Kalimantan Timur. *International Journal of Community Service Learning*. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v8i2.79094

Badan Narkotika Nasional. (2024). *Indonesia drugs report 2024*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. https://www.messitala.info/books/10

Dinansi, C. I. K. (2025). *Implementasi kebijakan P4GN (Studi nasional berbasis ketahanan sosial)*.

Dinansi, C. I. K., Puspitawati, D., & Wanto, A. H. (2024). Policy implementation of the national action plan P4GN towards strengthening national resilience. *Jurnal Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.14710/jis.23.2.2024.95-111

Hatta, M. (2022). *Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Belbuk.

Hidayat, A. R., & Fitriani, N. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan P4GN di Kota Makassar. *JAKPP*. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/19876

Hidayat, S. (2023). Analisis kebijakan kesehatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Medika*, 9(2), 125-138.

Hidayat, M. (2021). *Analisis kebijakan harm reduction pada pengguna narkoba suntik: Sebuah studi kasus*.

Khoirullah, M. S., & Hutabarat, R. R. (2024). Kebijakan penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ditinjau dari Undang-Undang Narkotika. *Legal Standing*. https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11927

Komara, E. E., Syakdiah, & Kusumawiranto, R. (2022). Implementasi kebijakan P4GN oleh BNNP DIY. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4528

Koran Kaltim. (2023). *450 orang di Kalimantan Utara konsumsi narkoba, terbanyak di Bulungan*. https://korankaltim.com/read/kaltimtara/44268/450-orang-di-kalimantan-utara-konsumsi-narkoba-terbanyak-di-bulungan

Kusuma, D. (2020). *Implementasi kebijakan Desa Bersinar (Bersih Narkoba): Hambatan dan tantangan*.

Lestari, N. (2022). *Lived experience pekerja sosial dalam mendampingi korban penyalahgunaan NAPZA*.

Mandala Putra, B., & Astika, C. (2023). Evaluasi pelaksanaan rencana aksi P4GN bidang pencegahan di Kota Bengkulu. *JIAP*. https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13518

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mindarti, L. I., Amalia, R., Wismanu, R. E., & Akbar, D. G. (2023). Implementasi kebijakan P4GN (Studi rehabilitasi di BNN Jakarta Selatan). *JPAP*. https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.7832

Nufa, P. A., Pribadi, I. A. P., Amanda, A., Sutikno, C., & Atika, Z. R. (2024). Implementasi P4GN di BNN Kabupaten Banyumas tahun 2023. *Kuasa*. https://doi.org/10.22437/kuasa.v2i1.21

Nugroho, P. (2020). *Pengalaman keluarga dalam mendukung kepatuhan hukum remaja pengguna narkoba*.

Nurhaliza, M., Hardian, D. E., & Sentosa, B. M. (2025). Implementasi kebijakan P4GN di BNN Kota Tangerang. *Perspektif*. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/perspektif/article/view/8537

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_2023

Prasetyo, D., & Suryani, L. (2024). Implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba oleh BNN di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*. https://journal.ui.ac.id/index.php/jpp/article/view/22345

Pratama, A. (2023). *Pengalaman petugas BNN dalam implementasi kebijakan P4GN di tingkat provinsi*.

Presiden Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020–2024*. https://inpresp4gn.bnn.go.id

Prokal. (2023). *Bulungan didominasi perkara narkotika*. https://www.prokal.co/kalimantan-utara/1773988021/bulungan-didominasi-perkara-narkotika

Putra, G. S., Rochaeni, A., & Wulandari, W. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang. *Praxis Idealist*. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/config/index.php/praxis-idealist/article/view/3852

Rahmawati, Y., & Syukri, A. (2023). Implementasi kebijakan P4GN di lingkungan pendidikan (Studi pada sekolah menengah di Kota Medan). *JUPIIS*. https://journal.unimed.ac.id/index.php/jupiis/article/view/17654

Sari, R., & Wibowo, T. (2022). *Fenomenologi stigma sosial pada mantan pecandu dalam program rehabilitasi berbasis masyarakat*.

Siregar, B. (2021). *Evaluasi kebijakan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia*.

Susanti, E., & Rahman, A. (2023). *Dinamika koordinasi lintas sektoral dalam pemberantasan jaringan narkotika internasional*.

Susanti, R., & Kurniawan, D. (2023). Implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Sleman. *Government Journal*. https://journal.uad.ac.id/index.php/Gov/article/view/23456

Wijaya, K. et al. (2023). *Makna tugas bagi polisi reserse narkoba: Pendekatan fenomenologi hermeneutik*.